

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

Partisipasi politik secara harfiah adalah keterlibatan dalam politik. Pada penelitian ini menunjuk pada partisipasi warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi warga di semua tahap kebijakan, dari keputusan sampai pada pengambilan keputusan, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan.¹

Kata kiai terkadang membuat perdebatan dengan kata sejenis. Misalnya dengan kata ulama. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 28 berbunyi:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ يَرْبُدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)

Artinya: *“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”*. (Q.S Fathir: 28).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat ini, kata Ulama pada Surat Fathir menjelaskan bahwa istilah Ulama digunakan untuk menjuluki hamba-hamba Allah swt yang takut. Orang yang mempunyai ilmu akan mengetahui Allah serta akan takut dan berharap kepada-Nya.

Perbedaan di antara istilah kiai dan ulama dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebutan Kiai lahir dari kesepakatan sosial yang telah wajar dikalangan masyarakat umum. Sebagaimana yang telah dijelaskan serta dalam perkembangan istilah itu telah dinisbatkan sebagai ahli agama. Sedangkan istilah ulama yang sifatnya cenderung tekstual, serta ruang lingkup penjelasannya bersumber dari wahyu Allah dalam surat Fathir ayat 28 menyebutkan kata ulama sebagai berikut : *innama yakhsya Allah min ibadil ulama*, setelah itu ditambah lagi dengan sabda Nabi yang berbunyi : *Al-ulama 'warosatul Ambiya'*. Karena para kiai merupakan orang yang berilmu mengenai ilmu agama serta mengajarkan kepada

¹ Hemafitria, Fety Novianty, Fitriani, “Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2, No. 1 (2021), h. 42.

masyarakat umum, maka status kiai menjadi serupa dengan sebutan ulama.²

Penjelasan mengenai partisipasi politik kiai dalam pilkades ini dapat dijelaskan menjadi beberapa bagian yaitu : partisipasi politik, bentuk partisipasi politik, tingkatan partisipasi politik, faktor yang berpengaruh dalam politik, pengertian elit, pengertian elit politik (tokoh agama), peran kiai dalam politik, pengertian pemilihan kepala desa.

1. Konsep Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Michael Rush dan Philip Althoft dalam Damsar tentang partisipasi politik, partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga biasa untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemimpin pemerintah. Semua aktivitas warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, termasuk pemilihan pemimpin pemerintahan, dapat tergolong sebagai kegiatan partisipasi politik.³

Menurut Ramlan Surbakti dalam Muhammad Dafan partisipasi politik diartikan bahwa kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum serta turut berpartisipasi dalam memilih pemimpin dalam sebuah pemerintahan.⁴

Menurut Miriam Budiardjo dalam Methodius partisipasi politik yaitu aktivitas individu maupun kelompok orang untuk terlibat dengan aktif dalam kehidupan politik caranya yaitu memilih pemimpin negara baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti memberikan hak suara, menjadi anggota kelompok

²Halili, "Makna Politik Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Bondowoso Tahun 2008)," *Skripsi*, (Surabaya, Fakultas Ushuluddin Institut AGAMA Islam Negeri Sunan Ampel, 2012), h. 20-21.

³Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 181.

⁴Muhammad Dafan Inanda, "Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008)," *Skripsi*, (Jakarta, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), h. 31.

kepentingan atau anggota suatu partai, mengikuti kampanye, menjalin hubungan (*contacting*) dengan anggota parlementer atau pejabat pemerintah dan lain-lain.⁵

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *Yel Partasari*, partisipasi politik yaitu aktivitas warga negara biasa yang bermaksud mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pemerintah.⁶

Secara umum, definisi oleh para ahli, partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang melibatkan satu orang atau sekelompok orang berpartisipasi aktif dalam politik, yaitu memilih para pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan tersebut antara lain menentukan pilihan pada saat pemilu, menjadi bagian organisasi politik/massa, dan berpartisipasi dalam kampanye politik.⁷

Lawan dari partisipasi politik adalah ketidakpedulian. Jika seseorang tidak ingin berpartisipasi, itu disebut apatis (secara politis) dalam beragam kegiatan politik kenegaraan di beragam bidang kehidupan seperti yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu kegiatan partisipasi politik, kesadaran politik, dan pendidikan politik yang ada di pedesaan ataupun yang ada di perkotaan membutuhkan dorongan serta perbaikan terus menerus demi kehidupan pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintah.⁸

⁵ Metodius Masa, "Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wajomara Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021," *Skripsi*, (Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, 2021), h. 20.

⁶ Yel Partasari, "Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilkada 2018 di Desa Betung," *Skripsi*, (Palembang, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021), h. 4.

⁷ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (Padang: UNP PRESS, 2012), h. 20.

⁸ Denis Aryanti, "Partisipasi Politik Kiai NU dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang," *Skripsi*, (Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 17-18.

b. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson dalam Damsar bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemilihan, terdiri dari kampanye, pemberian suara, bekerja untuk suatu pemilihan, mencari dukungan untuk seorang calon, maupun masing-masing kegiatan yang tujuannya untuk mempengaruhi hasil sistem pemilihan.
- 2) *Lobbying*, terdiri dari cara individu maupun kelompok guna menemui pemimpin-pemimpin politik dan penjabat-penjabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan-keputusan mereka tentang persoalan-persoalan yang melibatkan beberapa besar orang. Misalnya, tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan dukungan atau melawan tentang keputusan administratif tertentu atau suatu usul legislatif.
- 3) Aktifitas organisasi melibatkan partisipasi sebagai pejabat maupun anggota dalam sebuah organisasi yang tujuan utamanya dan jelas adalah mempengaruhi keputusan pemerintah.
- 4) *Contacting* atau mencari koneksi adalah aksi individu yang ditujukan untuk pejabat-pejabat pemerintah yang bermaksud mendapatkan keuntungan hanya untuk segelintir orang atau bahkan satu orang.
- 5) *Violence* atau tindakan kekerasan termasuk salah satu bentuk partisipasi politik, serta untuk kepentingan analisis terdapat manfaat guna pengertiannya sebagai satu kategori tersendiri yang artinya seperti upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menyebabkan kerugian harta benda ataupun fisik terhadap orang-orang.⁹

Menurut Gabriel A. Almond dalam A. ASahid Gantara partisipasi politik dibagi menjadi dua bentuk aksi yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik nonkonvensional. Partisipasi politik konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam suatu demokrasi modern. Adapun bentuknya sebagai berikut :

⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 188-189.

- 1) Pemberian suara.
- 2) Melakukan kegiatan kampanye.
- 3) Melakukan diskusi politik.
- 4) Membuat serta bergabung dengan kelompok kepentingan.
- 5) Komunikasi individual dengan pejabat politik serta administrasi.

Sedangkan bentuk partisipasi politik nonkonvensional merupakan kegiatan ilegal bahkan dipenuhi dengan kekerasan serta revolusioner. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan petisi.
- 2) Melakukan unjuk rasa atau berdemotransi.
- 3) Mogok.
- 4) Konfrontasi.
- 5) Aksi kekerasan politik terhadap harta benda misalnya perusakan, pembakaran bahkan pemboman.
- 6) Aksi kekerasan politik terhadap manusia misalnya penculikan atau bahkan pembunuhan.
- 7) Melakukan peperangan.¹⁰

Sedangkan bentuk partisipasi politik menurut Hermawan lebih sederhana, yaitu:

- 1) Partisipasi aktif
Partisipasi aktif merupakan kegiatan mengutarakan pendapat serta kritik terhadap suatu kebijakan, membayar pajak serta memilih pemimpin.
- 2) Partisipasi pasif
Partisipasi pasif yaitu kegiatan mematuhi pemerintah, menerima serta melaksanakan apapun keputusan pemerintah.¹¹

Berdasarkan hasil dari uraian di atas, dapat diketahui berbagai bentuk partisipasi politik diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya organisasi politik dan formasi organisasi komunitas sebagai bagian dari kegiatan sosial, dan penyalur harapan masyarakat yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara.

¹⁰ A. A Sahid Gantara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009), h. 317.

¹¹ Denis Aryanti, "Partisipasi Politik Kiai NU dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang," *Skripsi*, (Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 20.

- 2) Terbentuknya organisasi non pemerintah yang dikendalikan secara sosial serta memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah.

Dari berbagai kegiatan tersebut, dapat terlihat keragaman kegiatan partisipasi politik dari yang paling sederhana sampai yang rumit dari bentuk-bentuk mengutamakan kondisi damai hingga kekerasan. Akan tetapi semua kegiatan ini termasuk dalam rangka partisipasi politik.

c. Tingkatan Partisipasi Politik

Roth dan Wilson dalam Damsar membuat tipologi partisipasi politik berdasarkan piramida partisipasi. Pandangan Roth dan Wilson mengenai piramida partisipasi politik menjelaskan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat kegiatan politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Intensitas serta derajat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan politik disebut sebagai aktivis. Yang termasuk dalam kelompok aktivis ialah : Pemimpin dan para fungsionaris partai atau kelompok kepentingan, dan anggota partai atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh. Yang termasuk dalam kategori aktivitas politik yang dipandang negatif atau menyimpang misalnya adalah teroris, pelaku pembajakan guna memperoleh tujuan politik dan pembunuhan.

Lapisan selanjutnya adalah partisipan. Golongan partisipan berisi berbagai aktivitas misalnya petugas atau juru kampanye. Mereka yang ikut serta dalam proyek atau program sosial, sebagai pelobi politik, aktif dalam kelompok kepentingan atau partai politik.

Lapisan berikutnya yaitu kelompok pengamat. Kelompok pengamat terlibat dalam aktivitas politik yang tidak banyak menyita waktu, tidak intensif dan jarang melakukannya, serta tidak menuntut gagasan sendiri. Seperti memberikan suara dalam pemilihan umum (eksekutif dan legislatif), menghadiri kampanye, serta mendiskusikan tentang isu politik. Dan Lapisan terbawah yaitu golongan orang yang apolitis, adalah golongan orang yang tidak peduli tentang sesuatu yang berkaitan dengan politik. Kelompok ini tidak memberikan sedikit

pun tentang masalah politik.¹²



Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik

Sumber: Roth dan Wilson (dalam Damsar, 2010: 184)

d. Faktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah sebuah kegiatan tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Nimmo dalam Yalmena Miaz faktor yang mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik yaitu:

- 1) Peluang resmi, maksudnya ada peluang individu ikut serta dalam partisipasi politik akibat didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.
- 2) Sumber daya sosial, maksudnya keterlibatan ditentukan dari perbedaan geografis serta kelas sosial. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama berhubungan dengan sumber daya ekonomi ataupun sumber daya sosial untuk ikut serta dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, ada juga perbedaan dalam partisipasi misalnya agama, jenis kelamin, suku, usia, tempat tinggal, dan sebagainya.
- 3) Motivasi personal, maksudnya motivasi yang melandasi kegiatan berpolitik sangat beragam. Motif tersebut dapat dengan sengaja ataupun tidak disengaja, rasional/tidak emosional, dipikirkan atau tidak dipikirkan, diilhami psikologis atau sosial dan diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar diri sendiri.¹³

¹²Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 183-184.

¹³Yalvena Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (Padang: UNP PRESS, 2012), h. 24.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik ada dua yaitu:

- 1) Kesadaran politik kepada pemerintah (sistem politik), maksudnya adalah kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Yaitu mengenai pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat serta politik, menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat serta politik tempat hidup.
- 2) Kepercayaan kepada pemerintah, maksudnya yaitu bagaimana apresiasi serta penilaian terhadap kebijakan pemerintah serta pelaksanaan pemerintah.¹⁴

Hasil dari beberapa faktor tersebut menjelaskan bahwa dalam mendorong partisipasi politik, dipengaruhi oleh banyak faktor. Masyarakat dengan ciri-ciri sosial tertentu sangat berpengaruh dalam partisipasi politik. Individu yang memiliki ekonomi tinggi serta status sosial tinggi di nilai tidak hanya memiliki pengetahuan politik, namun memiliki minat dan perhatian pada politik serta kepercayaan terhadap pemerintah.

2. Konsep Elit

a. Pengertian Elit

Elit mempunyai arti bahwa setiap masyarakat dibagi menjadi dua jenis yang terdiri dari: yang pertama sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan serta karenanya menjabat dalam posisi untuk memerintah. Sedangkan yang kedua adalah massa yang berjumlah besar yang lebih pada diperintah. Elit sering dijelaskan dengan pengertian sebagai kumpulan orang individu-individu yang memimpin, berbeda dengan massa yang memiliki jejaring kelompok atau kekuasaan yang berbeda dalam lingkaran kekuasaan ataupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto mengategorikan lapisan dalam tiga macam yaitu: (*Governing elite*) elit yang memerintah, (*non-governing elite*) elit yang tidak diperintah, serta (*non-elite*) massa umum.

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 184.

Menurut Putnam dalam Nurhadi dan Suarso kaum elit digambarkan menjadi tiga yaitu :

- 1) Secara eksternal bersifat sama, bersatu serta mempunyai kesadaran kelompok, adakalanya mempunyai nilai-nilai kesetiaan serta kepentingan bersama dalam sebuah pandangan yang tidak sama.
- 2) Orang yang mengatur dirinya sendiri kehidupan sendiri keanggotaannya suatu masyarakat terbatas, serta memilih pemimpin dari kalangan istimewa yang berisi dari beberapa orang.
- 3) Elit yang bersifat otonom, kebal gugatan serta hanya mementingkan kelompoknya.¹⁵

Sedangkan Pareto dalam Jayadi Nas mengungkapkan bahwa setiap masyarakat diatur oleh sekelompok kecil dengan kualitas yang diperlukan untuk kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil tersebut disebut elit yang bisa mencapai pusat kekuasaan. Elit merupakan orang-orang sukses yang bisa menduduki status sosial yang tinggi. Pareto menekankan bahwa dalam secara umum para elit bersumber dari kelas yang sama, yaitu yang kaya serta yang pintar dengan memiliki kelebihan dalam bidang matematika, bidang karate, bidang musik dan lain sebagainya.¹⁶

Sedangkan Lassweel mengemukakan bahwa elit adalah golongan mereka yang berhasil mencapai dominasi dalam suatu masyarakat dan nilai-nilai yang mereka kembangkan sangat dihargai dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pada setiap kehidupan sosial akan tumbuh beberapa anggota sebagai elit.

¹⁵ Nurhadi, Sunarso, "Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih," *JIPPK* Vol 3, No 2 (2018), h. 173.

¹⁶ Jayadi Nas, *Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintah dan Politik* (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2007), h. 34.

¹⁷ Saiful dan Rusli Yusuf, *Politik dan Kearifan Lokal* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), h. 18.

b. Elit Politik (Tokoh Agama)

Pengertian mengenai kiai didefinisikan oleh beberapa ahli antaranya:

- 1) Menurut Abdullah ibn Abbas dalam Hamdan, kiai adalah mereka yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu.¹⁸
- 2) Menurut Nurhayati Djamas, kiai merupakan Ulama atau pemimpin sebuah pondok pesantren.¹⁹
- 3) Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam Ahmad Subakir menjelaskan bahwa istilah kiai diartikan untuk menamakan tiga hal. *Pertama*, kiai adalah gelar yang berhubungan dengan benda-benda pusaka ataupun sesuatu yang dikeramatkan, seperti Kiai Selamet sebagai nama untuk seekor kerbau milik keraton Solo yang dikeramatkan, Kiai Jaladara, Kiai Garudayaksa, Kiai Ratapralaya dan sebagainya, yang merupakan nama-nama pusaka di Keraton Yogyakarta yang dianggap keramat. *Kedua*, sebutan kiai diberikan kepada orang tua pada umumnya, serta pada perjalanannya sebutan tersebut menjadi “ki” begitu juga sebutan itu Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain. *Ketiga*, sebagai gelar yang diberikan untuk seorang ahli agama islam yang mempunyai pesantren serta mengajarkan ilmu-ilmu agama tersebut yang bersumber dari kitab-kitab kuning kepada santrinya.²⁰
- 4) Sedangkan Kiai menurut WJS Poewodarminto dalam Rudi Subiyakto adalah sebutan untuk alim ulama Islam.²¹

Kiai adalah tokoh agama yang merupakan anggota lapisan elit baik dalam bidang kehidupan ekonomi, sosial, politik dan tentunya dalam bidang keagamaan. Peran seorang kiai dalam bidang kehidupan ini terlihat nyata

¹⁸Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama: Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), h. 18.

¹⁹Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada 2008), h. 55.

²⁰Ahmad Subakir, *Relasi Kiai dan Kekuasaan: Menguak Relasi Kiai dan Pemerintah Daerah dalam Politik Lokal* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2018), h. 37.

²¹Rudi Subiyakto, “Keterlibatan Kiai dalam Pilkada: Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* vol.1 no. 1 (2011), h. 44.

dalam sistem pengambilan keputusan tentang pernyataan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Kiai adalah sosok tokoh agama yang strategis dan pusat masyarakat. Posisi kiai terkait menjadi orang yang berpendidikan dalam masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan dalam pemilihan kepala desa.²²

Kiai sebagai elit lokal yang memiliki kharisma kuat di dalam masyarakat untuk membentuk partisipasi politik dimasyarakat sebab pada hakikatnya hal ini tidak berbenturan dengan agama, agama (islam) dalam pandangan paradigma mengakui agama islam sebagai sistem sosial termasuk juga sebagai sistem politik. Kedua hal tersebut menunjukkan paradigma fikih berkembang sesuai perkembangan ilmu modern oleh sebab itu membolehkan umat islam untuk ikut berpartisipasi aktif dalam sistem politik modern. Sebagai elit lokal menjadi jembatan bagi kiai untuk dengan mudah masuk dalam lingkungan politik praktis.²³

c. Peran Kiai dalam Politik

Peran kiai dalam politik selalu menarik untuk dibahas, hal ini karena penelitian kiai dapat dilihat tidak hanya dari satu faktor saja (kiai sebagai tokoh agama), akan tetapi memiliki banyak wajah yang menggambarkan keragaman politik kiai.²⁴

Menurut Sulaiman dalam Witri Safitri menjelaskan bahwa dasar peran kiai dalam masyarakat pada lapisan sosial di pedesaan, kiai merupakan golongan elit dalam bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan khususnya dalam bidang agama.

Partisipasi politik kiai memiliki banyak bentuk, dalam konteks peran pada kehidupan politik, jenis-jenis keterlibatan kiai politik yang dapat dijelaskan sebagai berikut : bentuk partisipasi politik yang biasa yaitu

²²Farid Nurdiansyah dan Warsono, "Politik pada Pemilihan Kepala Desa yang dipengaruhi oleh Kiai," *Jurnal Universitas Negeri Surabaya* vol 06, no. 02 (2018), h. 642.

²³Nurhadi dan Sunarso, "Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih," *Jurnal Imiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* vol. 3 No. 2 (2018), h173.

²⁴Rudi Subiyakto, "Keterlibatan Kiai Dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2011), h. 41.

pemberian suara pada saat pemilu, biasanya lebih luas dibandingkan dengan keterlibatan politik lainnya. Diluar itu, ikut serta dalam kampanye pemilu, membantu penyelenggaraan pemilu, mencari dukungan untuk seorang kandidat adalah bentuk partisipasi politik. Namun harus diakui bahwa kegiatan pemilu adalah suatu bentuk besar dari partisipasi politik kolektif, yang membedakannya dari partisipasi politik lainnya.

Kiai secara tradisional merupakan elit yang berpengaruh dalam umat islam. Kiai merupakan elit politik yang memiliki pengaruh kuat terhadap sikap politik umat islam. Peran kritis kiai terdapat pada posisi sebagai pemuka agama. Kiai adalah bagian dari elit sebuah desa yang mencoba membawa masyarakatnya ke ideal seperti yang konsepsikan oleh islam.²⁵ Setiap kiai mencoba menerjemahkan berbagai perubahan serta perkembangan di bidang sosial budaya dan politik agar masyarakat desa bisa mengerti.

Berbagai sikap politik kiai yang terjadi menunjukkan adanya partisipasi kiai dalam bidang politik yang didukung oleh berbagai motif. Motif disini adalah faktor yang mempengaruhi kiai baik dari diri sendiri ataupun dari luar, disadari ataupun tidak adalah guna mencapai tujuan tertentu.²⁶

Posisi kiai dalam struktur sosial di posisikan sebagai tingkatan elit. Kiai dijadikan sebagai aspirasi serta kebutuhan masyarakat disekelilingnya. Oleh sebab itu, kiai tidak jarang atau bahkan harus bertautan dengan politik.²⁷

3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa atau sering disebut dengan pilkades merupakan suatu kegiatan memilih pemimpin desa yang baru yang dilaksanakan secara langsung oleh penduduk

²⁵ Witri Safitri, "Peran Kiai dalam Kemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Cianjur," *Skripsi*, (Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2018), h. 22-23.

²⁶ Saidi, "Kiai dan Politik : Mengintip Motif Kiai NU dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 10, No. 1(2016), h.4.

²⁷ Syafa Aulia Achidsti, "Eksistensi Kiai dalam Masyarakat," *Ibda Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2(2014), h.66.

desa setempat. Salah satu bagian dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia adalah pemilihan kepala desa (pilkades). Pilkades adalah sebuah bentuk praktik demokrasi dalam ruang lingkup kehidupan yang paling sederhana. Pemilihan kepala desa ini diikuti oleh para calon yang mampu atau berkompeten dan sudah ikut proses seleksi sebelumnya. Pemilihan ini terbuka, yang berarti dimulai dari tahap persiapan pilkades sampai pada pemungutan suara serta perhitungan suara masyarakat berhak mengetahui. Proses pilkades juga harus bersifat langsung, yang berarti secara langsung masyarakat desa memilih calon kepala desa tanpa adanya pelantara. Dalam pilkades tidak bisa terpisahkan dari partisipasi politik masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat bisa terlibat secara langsung dalam proses kegiatan pilkades dan berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah desa.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Dasar yang termasuk temuan atau teori dari penelitian sebelumnya adalah sebagai data pendukung atau referensi. Diantara data pendukung menurut penulis, yang harus menjadi bagian yang tersendiri yaitu hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Jadi penulis tinjau beberapa hasil penelitian dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul/Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Denis Aryanti	Partisipasi Politik Kiai NU dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.	Penelitian yang dikaji oleh Denis Aryanti ingin mengkaji mengenai partisipasi politik kiai NU dalam pemilihan kepala desa. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apa	Persamaan penelitian Denis Aryanti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi

²⁸Ahmad Averus & Dinda Alfina, "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Moderat* Vol. 6, No. 3 (2020), h. 587.

		<p>Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017.</p>	<p>saja yang menjadi faktor dalam mempengaruhi partisipasi politik kiai NU dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian Denis Aryanti adalah menjelaskan bahwa partisipasi politik kiai NU dalam pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan bentuk motivasi, nasihat, serta netralitas dalam pilkades dengan cara memberikan nasihat kepada masyarakat yang awam tentang pilkades, pendidikan politik dan motivasi yang diberikan melalui</p>	<p>politik kiai dalam pilkades. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih memfokuskan tentang elit lokal tokoh agama dalam pemilihan kepala desa.</p>
--	--	--	--	--

			panitia pemilihan, tokoh pegawai kantor kepala desa serta tokoh masyarakat lainnya.	
2.	Farid Nurdiansyah dan Warsono	Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Yang Dipengaruhi Oleh Kiai (Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan). Jurnal Universitas Negeri Semarang Vol. 06, No. 02, 2018.	Penelitian yang dikaji oleh Farid Nurdiansyah dan Warsono ingin mengkaji mengenai pengaruh kiai dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Bakalpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Hasil dalam penelitian ini yaitu dengan kharisma yang dimiliki seorang kiai pengaruh kiai masih kuat dalam pelaksanaan pilkada hal ini ditunjukkan dengan kemenangan calon yang didukung oleh kiai.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengaruh kiai dalam pilkades. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitiannya dimana dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
3.	Rudi Subiyakto	Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006). Jurnal Ilmu	Penelitian yang dikaji oleh Rudi Subiyakto ingin mengkaji mengenai keterlibatan kiai dalam pilkada. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui dalam	Persamaan penelitian Rudi Subiyakto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

		Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No.1, 2011	pilkada di Kabupaten Banjarnegara apa dampak keterlibatan kiai dalam pilkada tersebut. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Banjarnegara. Hasil dari penelitian Rudi Subiyakto adalah keterlibatan kiai dalam pilkada dibagi menjadi dua yang pertama menjadi aktor maksudnya kiai masuk dalam partai politik tertentu serta menjadi tim sukses calon, yang kedua kiai sebagai partisipan dalam hal ini kiai masuk dalam partai tertentu serta namanya tertulis dalam tim sukses. Akan tetapi mereka mengkampanyekan calon tidak dengan cara terbuka.	mengenai keterlibatan kiai dalam politik. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian sebelumnya adalah pada pilkada sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah pada pilkades.
4.	Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar	Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	Penelitian yang dikaji oleh Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar ingin mengidentifikasi mengenai peran elit lokal dalam	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peran elit lokal dalam politik sedangkan perbedaannya

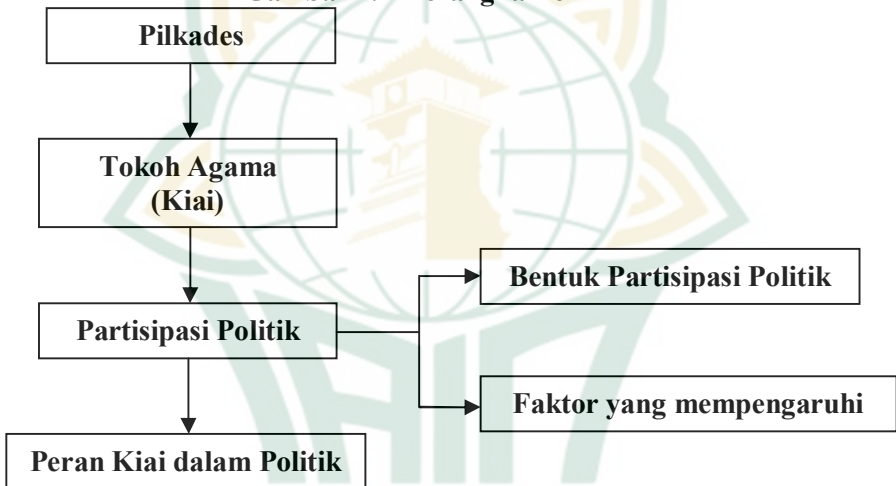
		<p>Toraja Utara Tahun 2015.</p> <p>Jurnal Sosial Politik Humaniora, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018.</p>	<p>meningkatkan partisipasi pemilih dan dampak keterlibatan elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara padatahun 2015. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit lokal berperan dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada di Toraja utara sesuai dengan kapasitasnya. Elit lokal ikut serta dalam mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim relawan serta menjadi tim kampanye. Tokoh agama menjadi bagian dai penyelenggara pilkada serta mensosialisasikan pelaksanaan pilkada melalui kegiatan keagamaan. Sedangkan tokoh adat berperan dengan cara dengan</p>	<p>adalah fokus penelitian sebelumnya adalah pada pilkada sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah pada pilkades.</p>
--	--	--	--	--

			<p>kharisma yang dimiliki tokoh adat ikut serta dalam mensosialisasikan informasi pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam pilkada.</p>	
5.	Halili	<p>Makna Politik Kiai Dalam Pilkada (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2008). Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Sunan Ampel, 2012.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Halili ingin mengkaji mengenai makna politik kiai dalam pilkada. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian Halili menyimpulkan bahwa keterlibatan kiai dalam politik pada pilkada di kabupaten bondowoso dijelaskan menjadi tiga macam yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif dan apatis.</p>	<p>Persamaan penelitian Halili dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai partisipasi kiai dalam politik. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian dimana fokus penelitian sebelumnya adalah pada pilkada sedangkan dalam penelitian ini adalah pada pilkades. Serta pada penelitian sebelumnya menjelaskan secara rinci 3</p>

				<p>macam partisipasi politik kiai sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada partisipasi aktif kiai.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pada pilkades tahun 2021 di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati terdapat keterlibatan tokoh agama (kiai) yang dapat dianalisis dengan teori partisipasi politik. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa terdapat adanya peran tokoh agama (kiai) yaitu dari bentuk partisipasi politik yang dilakukan serta beberapa faktor yang mempengaruhinya.